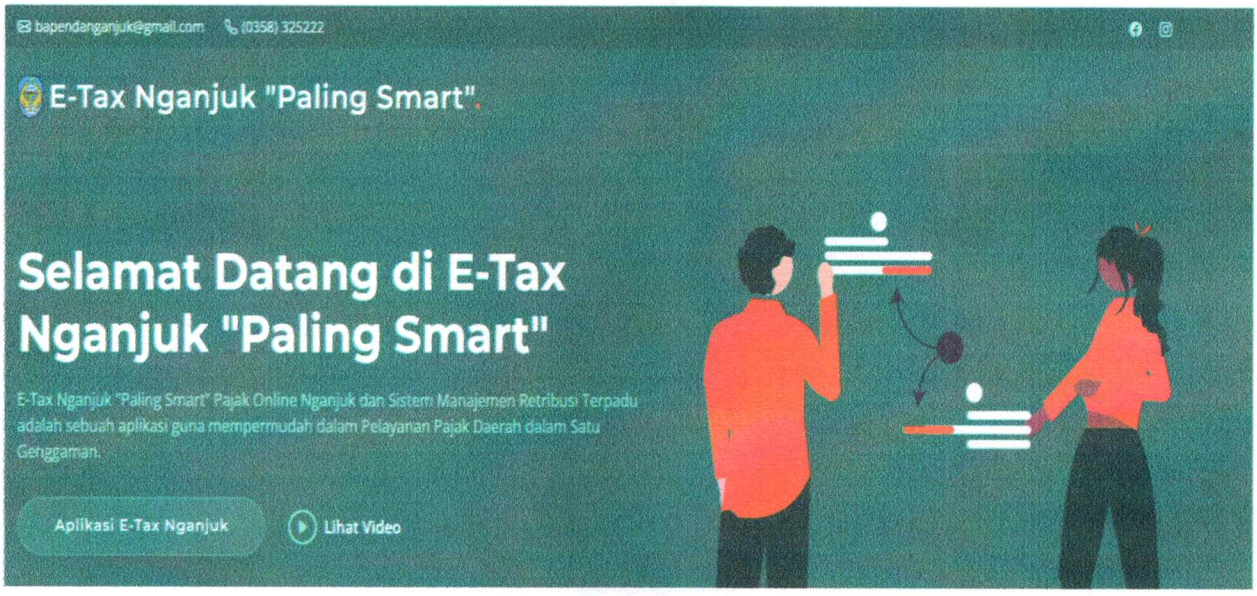
BAPENDA #BAIK#
(BApenda – berIntegritas-berKinerja)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH, MURAH, AMAN, HANDAL

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026. Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penunjang sebagai pelaksana dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengembang misi ke-4 Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yaitu "Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur".

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2024 – 2026 seperti Tabel berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026 dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026

Misi ke-4 : Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur

Tujuan		Sasaran	
RPD Tahun 2024 - 2026	Renstra Bapenda Tahun 2024 - 2026	RPD Tahun 2024 - 2026	Renstra Bapenda Tahun 2024 - 2026
"Nganjuk Akuntabel". Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah

Dalam mewujudkan Tujuan, sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026

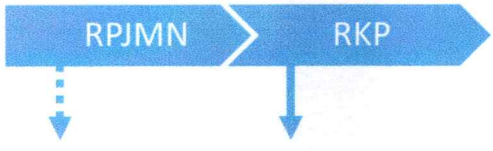
Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2026.

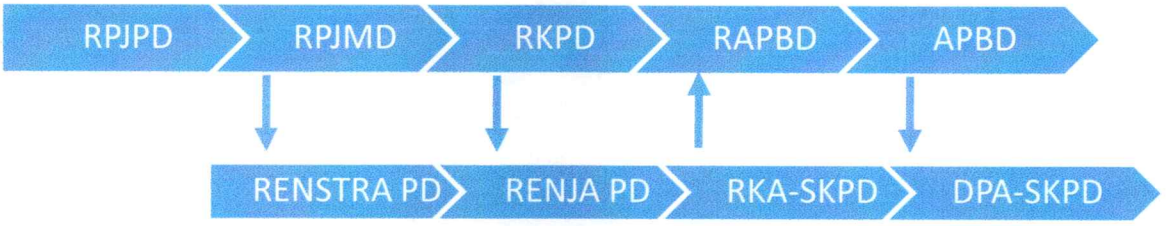
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran





Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

1.1. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tantang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
31. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan

kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3 (ke-tiga) periode tahun 2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.2. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026;
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional Dalam pelaksanaan kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah tersusun :

1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan retribusi Perijinan tetentu tanggal 19 Pebruari 2024;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah tanggal 23 April 2024.

Sedangkan terkait Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan Digitalisasi daerah, Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota serta tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah telah disusun :

- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2023 tentang Implementasi Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/95/K/411.013/2022 tentang Peta jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk;

- Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 88//870/411.403/2022 tebtabg Percepatan digitalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk.

Hasil dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada semester 1 Tahun 2024 memperoleh tahap DIGITAL dengan Score 94,55% sebagai bukti berikut :

No	Kota/Kabupaten	Skor IETPD Sem I 2024 Prediksi
1	Kota Blitar	97.00%
2	Kota Kediri	99.00%
3	Kota Madiun	98.75%
4	Kabupaten Blitar	95.65%
5	Kabupaten Kediri	95.75%
6	Kabupaten Madiun	96.65%
7	Kabupaten Magetan	90.15%
8	Kabupaten Nganjuk	94.55%
9	Kabupaten Ngawi	98.75%
10	Kabupaten Pacitan	91.80%
11	Kabupaten Ponorogo	97.50%
12	Kabupaten Trenggalek	94.25%
13	Kabupaten Tulungagung	98.75%

Sedangkan pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

3.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasai Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
KEUANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah**	85,5 %	91	85 %	81,42 %	95,79	85,25 %	85,25	100%
	Nilai Sakip SKPD	A (90)					A	A	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	13 dok	17	13 dok	10 Dokumen	76,92	13 Dokumen	40,00	3,08

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, yang selesai**	6	dok	10	6	dok	5	Dokumen	83,33	6	Dokumen	21,00	3,50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Evaluasi yang selesai**	7	dok	7	7	dok	6	Dokumen	85,71	7	Dokumen	20,00	2,86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Laporan Keuangan yang selesai**	71	Dokumen	82	71	dok	101	Dokumen	142,25	71	Dokumen	254,00	3,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	45	dokumen	44	45	dok	37	Orang	82,22	45	Orang	126,00	2,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Laporan	1	1	lap	1	Laporan	100,00	1	Laporan	3,00	3,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan,bulanan, triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun			37	25	Laporan	18	Laporan	72,00	25	Laporan		

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	15	Laporan	-		dok		Dokumen			Dokumen	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**			4	1	dok	1	Dokumen		1			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah			4	1	dok	1	Dokumen		15			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	12	Laporan	12	12	dok	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	44	Orang	43	44	orang	36	Orang	81,82	44	Orang	123,00	2,80
Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Dokumen	12	12	Dokumen	8	Dokumen	66,67	12	Dokumen	32,00	2,67
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	63	Orang	63	63	org	54	Orang	85,71	63	Orang	180,00	2,86

	n Perundang-undangan	undangan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan**	12	Laporan	12	12	bk	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor				13	-	Paket		Paket				13,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135	Paket	10	90	Paket	65			100		175,00	1,30
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60	Paket	63	60	Paket	52	Paket	86,67	60	Paket	175,00	2,92
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118.096	paket	169.161	118.096	paket	88,572	paket	0,08	118.096	paket	287.345,57	2,43
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120	Dokumen	1.110	1.120	dokumen	830	Dokumen	74,11	1.120	Dokumen	3.060,00	2,73

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	12	Dokumen	33,00	2,75
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	Laporan		-	Laporan	-	laporan		4	Laporan	4,00	1,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	2	laporan	34	2	Laporan	1	Laporan	50,00	2	Laporan	37,00	18,50
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan						0			1	Unit	1,00	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			-			0				-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan				187	Unit	187				Unit	187,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	20	unt	34	15	Unit	14	Unit	93,33	5	Unit	53,00	2,65
	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan			-			0					-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	3	jasa	27	3	Jasa	3	Jasa	100,00	3	Jasa	33,00	11,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12	Laporan	33,00	2,75

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	52	unit	74	52	unit	37	unit	71,15	52	unit	163,00	3,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19	unit	19	19	unit	15	unit	78,95	19	unit	53,00	2,79
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10	unit	17	10	unit	5	unit	50,00	10	unit	32,00	3,20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22	unit	47	22	unit	16	unit	72,73	22	unit	85,00	3,86
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1	gedung	1	1	gedung	1	gedung	100,00	1	gedung	3,00	3,00
PROGRAM PENGELOLAA	Prosesntase Kenaikan PAD			(115,41)									

N PENDAPATAN DAERAH	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	997.600,00	WP	667000	WP	612.323	WP	91,80	992.700,00	WP	1.605.023,00	161%
	Jumlah Wajib Pajak Baru	386.500,00	WP	2000	WP	1.746	WP	87,30	386.000,00	WP	387.746,00	100%
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00	%	100	%	74,10	%	74,10	100,00	%	100,00	100%
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00	%	100	%	6,86	%	6,86	100,00	%	100,00	100%
Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosesntase Kenaikan PAD			(115,41)								
	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu	997.600,00	WP	667000	WP	612.323	WP	91,80	992.700,00	WP	1.605.023,00	161%
	Jumlah Wajib Pajak Baru	386.500,00	WP	2000	WP	1.746	WP	87,30	386.000,00	WP	387.746,00	100%
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00	%	100	%	74,10	%	74,10	100,00	%	100,00	100%
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00	%	100	%	6,86	%	6,86	100,00	%	100,00	100%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan	3	Dokumen	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	9,00	3,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijaka	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	Dokumen	3	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	5,00	#DIV/0!

	n Pajak Daerah											
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	4	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12 Laporan	25,00	2,08
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Jenis	26	25	Jenis	25	Jenis	100,00	25 Unit	76,00	3,04
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	12	12	Laporan	9	Laporan	75,00	12 Laporan	33,00	2,75
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	2	2	Laporan	1	Laporan	50,00	2 Laporan	5,00	2,50

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	3.000	OP	5.873	3.000	OP	7192	OP	239,73	3.000	OP	16.065,00	5,36
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dokumen	24	24	Dokumen	18	Dokumen	75,00	24	Dokumen	66,00	2,75
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.000	Layanan	34.955	35.000	Layanan	14844	Layanan	42,41	35.000	Layanan	84.799,00	2,42
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	12	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	12	Dokumen	33,00	2,75
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	12	Dokumen	33,00	2,75
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	12	Dokumen	33,00	2,75

	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	1	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	12	Dokumen	22,00	1,83
	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	lap	4		lap		lap		12	Dokumen	16,00	1,33
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	laporan	-	12	laporan	9	laporan	75,00	12	laporan	21,00	1,75

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,79%	Sangat tinggi

Program Pengelolaan Pendapatan 1. Jumlah wajib pajak yang membayar teapt waktu 2. Jumlah wajib pajak baru 3. Prosentase Realisasi Pajak Daerah 4. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	91,80 87,30 74,10% 6,86%	Sangat Tinggi Tinggi Sedang Sedang
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
1. Lokasi sulit terjangkau dengan SDM yang terbatas	Target tidak Optimal	1. Kerja sama dengan Pihak ketiga
1. Belum semua Subyek Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak	Target tidak optimal	- Melaksanakan Pendataan secara terus menerus - Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak
2. Wajib pungut kuatir apabila ditambah pajak, konsumen tidak mau membeli lagi	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pungut - Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media sosiaal, pemasangan banner
3. Sistem Pengelolaan Pajak dan retribusi terganggu (virus, Hacker)	Penerimaan tertunda	Memasang alat untuk mengantisipasi virus, hacker
4. WP/WR tidak melaporkan pajak sesuai omset penjualan/penggelapa n pajak	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak - Melaksanakan pengawasan
5. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM	Target dan realisasi tidak optimal	Mengusulkan sdm untuk mengikuti Bintek Pemeriksa Pajak, Analis Pajak, Juru sita, Penagihan pajak

6. Masih adanya piutang pajak	Realisasi tidak optimal	1. Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak 2. Verifikasi data piutang 3. Penghapusan piutang
7. Pembayaran Pajak Tunai	Penerimaan ada yang dibawa oleh petugas pungut	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat, wajib pungut baik secara tatap muka, media social, banner
8. Belum optimalnya penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
9. Belum optimalnya penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
10. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil

i. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.452.965.706.266,00	2.502.024.164.155,83	102,00	2.444.412.672.174,00	2.606.023.590.227,47	106,61	2.335.585.700.404,39	2.435.396.958.079,43	104,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	384.183.486.327,00	445.907.239.703,83	116,07	359.762.424.055,00	475.640.256.030,47	132,21	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	124,47
PENDAPATAN TRANSFER	1.910.407.441.736,00	1.906.607.928.426,00	99,80	1.975.606.394.507,00	2.021.339.481.197,00	102,31	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	100,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.374.778.203,00	149.508.996.026,00	94,40	109.043.853.612,00	109.043.853.000,00	100	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	102,56

URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.767.448.476.470,00	2.195.440.627.978,97	79,33	2.302.594.818.355,96	2.687.294.591.272,60	116,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH	481.571.527.997,00	314.794.901.234	65,37	358.015.575.168,96	402.455.177.750,60	112,41
PENDAPATAN TRANSFER	2.285.876.948.473,00	1.880.645.726.745	82,27	1.892.837.830.312,00	2.234.991.486.508,00	118,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		-		51.741.412.875,00	49.847.927.014,00	96,34

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu :

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
- Prosentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target Renstra 2018-2023		Target Renstra 2024-2026		REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Capaian Analisa
		Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n +1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n-1 2025	
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16.70	16.75	20.00	20.25	17.82	15.18	20.00	20.25	Target Renstra Tahun n-2 atau Tahun 2022 sebesar 16.70 dengan realisasi 17.82 sehingga capaian kinerja 106.71% sedangkan Tahun n-1 atau Tahun 2023 target renstra sebesar 20.00 dengan realisasi 15.18 sehingga capaian kinerja 90.63%
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	8.25	8.50	18.00	8.00	(0.24)	(9.81)	18.00	8.00	Tarrget Renstra Tahun n-2 atau Tahun 2022 sebesar 8.25 dengan realisasi -0.24 sehingga capaian kinerja -2.91 sedangkan target tahun n-1 atau tahun 2023 sebesar 8.50 dengan realisasi sebesar -9.81 sehingga capaian kinerja -115.41

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

➢ Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan Indikitor Prosentase PAD terhadap

Pendapatan, Untuk Tahun n-2 atau Tahun 2022 dengan realisasi kinerja 17,82 dari target 16,70 sehingga capaian kinerja 106,71% Sedangkan Tahun n-1 atau Tahun 2023 dengan realisasi kinerja 15,18 dari target 16,75 sehingga capaian kinerja 90,63%.

- Sasaran

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase peningkatan PAD yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%.

- Capaian sasaran kinerja Tahun n-2 atau Tahun 2022 tercapai (82,43)% dari target 8,25% yang terealisasi (6,80)%
- Capaian sasaran kinerja Tahun n-1 atau Tahun 2023 tercapai (114,68)% dari target 8,50% yang terealisasi (9,75)%

Capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini :

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			NAIK/TURUN 23/22		TAHUN 2021			NAIK/TURUN 22/21	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	Rp	%	TARGET	REALISASI	%	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.993,86	482.466.177.760,69	108,06	384.183.486.327,88	445.523.933.540,94	116,07	(43.468.755.780,34)	(9,75)	359.762.424.955,00	478.462.298.144,79	132,99	(32.538.364.684)	(6,8006)
Pajak Daerah	136.875.256.000,00	149.424.806.824,86	109,17	122.305.900.000,00	135.971.842.647,00	110,44	14.352.858.177,86	10,626	88.489.600.000,00	122.126.175.836,00	138,01	12.945.767.611	0,1060
Retribusi Daerah	29.260.340.224,86	29.386.629.455,58	100,43161	27.301.537.582,00	26.492.593.548,82	97,04	2.894.035.906,76	10,924	27.521.750.427,00	25.138.334.329,00	91,34	1.354.259.229	0,0539
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.425.444.869,86	4.425.444.868,86	99,999999997	4.099.258.629,00	4.099.258.627,54	100,00	326.186.240,32	7,957	3.741.456.500,00	4.848.422.262,00	107,99	58.836.366	0,0146
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600,00	279.218.302.612,16	108,60	230.477.699.117,00	280.260.139.717,18	121,60	(61.041.836.105,02)	(21,780)	240.009.618.028,00	327.157.366.517,79	136,31	(46.897.227.801)	(0,1435)

Guna mendukung tercapainyanya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didukung dengan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/SubKegiatan (Output)	KINERJA			ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET	REALISASI	%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90 %	81,42 %	90,47	13.266.969.800,00	5.170.140.466,00	38,97
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai	13 Dok	10 Dok	76,92	40.260.100,00	33.385.000,00	82,92

SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dok	5	Dok	83,33	20.381.300,00	18.215.000,00	89,37
SubKeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	7	Dok	6	Dok	85,71	19.878.800,00	15.170.000,00	76,31
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang selesai	71	Dok	101	Dok	142,25	10.676.582.850,00	3.689.557.726,00	34,56
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	37	Orang	82,22	10.622.025.850,00	3.662.334.226,00	34,48
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100,00	4.605.000,00	4.593.000,00	99,74
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	25	Laporan	18	Laporan	72,00	49.952.000,00	22.630.500,00	45,30
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	100,00	24.338.000,00	13.240.500,00	54,40
SubKeg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	100,00	24.338.000,00	13.240.500,00	54,40
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	176.384.500,00	160.168.000,00	90,81

SubKeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44	Orang	36	Orang	81,82	35.200.000,00	26.586.000,00	75,53
SubKeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	8	Dok	66,67	4.961.500,00	3.687.000,00	74,31
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	63	Orang	54	Orang	85,71	136.223.000,00	129.895.000,00	95,35
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum yang dilaksanakan	12		9		75,00	596.500.500,00	344.579.498,00	57,77
SubKeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket		Paket				
SubKeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	90	Buah	65	Buah	72,22	150.000.000,00	116.977.638,00	77,99
SubKeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	60	Paket	52	Paket	86,67	74.999.500,00	46.376.165,00	61,84
SubKeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096	paket	88572	paket	75,00	46.998.900,00	27.221.655,00	57,92
SubKeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120	Lembar	830	Lembar	74,11	4.200.000,00	2.650.000,00	63,10
SubKeg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang terdia	12	Laporan	9	Laporan	75,00	9.970.000,00	6.058.680,00	60,77

SubKeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Laporan	9	Laporan	75,00	235.354.000,00	97.030.060,00	41,23
SubKeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis	12	Dok	9	Dok	75,00	74.978.100,00	48.265.300,00	64,37
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	2	Unit	1	Unit	50,00	639.024.250,00	261.032.000,00	40,85
SubKeg. Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan	50	Unit	187		374,00	109.187.250,00	107.335.000,00	98,30
SubKeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15	Unit	14	Unit	93,33	529.837.000,00	153.697.000,00	29,01
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang yang dilaksanakan	3	jasa	3	Jasa	100,00	736.340.700,00	493.182.762,00	66,98
SubKeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	9	Laporan	75,00	5.000.000,00	2.338.000,00	46,76
SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12	Laporan	9	Laporan	75,00	206.100.000,00	140.835.349,00	68,33
SubKeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12	Laporan	9	Laporan	75,00	525.240.700,00	350.009.413,00	66,64
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	52	Unit	37	Unit	71,15	377.538.900,00	174.994.980,00	46,35

SubKeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	19	Unit	15	Unit	78,95	195.078.900,00	88.927.580,00	45,59
SubKeg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10	Unit	5	Unit	50,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
SubKeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	Unit	16	Unit	72,73	125.000.000,00	35.595.900,00	28,48
SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100,00	53.960.000,00	48.971.500,00	90,76
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	667.000	WP	612.323	WP	91,80	4.413.545.900,00	1.922.107.664,00	43,55
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2.000	WP	1746	WP	87,30			
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	74,1	%	74,10			
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	6,86	%	6,86			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	667.000	WP	612.323	WP	91,80	4.413.545.900,00	1.922.107.664,00	43,55
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2.000	WP	1746	WP	87,30			
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	74,1	%	74,10			
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	6,86	%	6,86			
SubKeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak Baru	3	Dok	3	Dok	100,00	250.000.000,00	6.553.500,00	2,62

SubKeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah	1	Dok	1	Dok	100,00	140.000.000,00	20.652.550,00	14,75
SubKeg. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	12	Laporan	9	Laporan	75,00	270.000.000,00	153.997.900,00	57,04
SubKeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Jenis	25	Jenis	100,00	438.676.800,00	383.031.602,00	87,32
SubKeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12	Laporan	9	Laporan	75,00	241.323.000,00	82.173.400,00	34,05
SubKeg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2	Laporan		Laporan	0,00	332.000.000,00	11.333.000,00	3,41
SubKeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	3.000	OP	7192	OP	239,73	62.281.000,00	28.268.737,00	45,39
SubKeg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dok	18	Dok	75,00	184.225.000,00	105.366.600,00	57,19

SubKeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	35.000	Layanan	14844	Layanan	42,41	115.000.000,00	48.873.300,00	42,50
SubKeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	1.315.727.000,00	726.346.300,00	55,20
SubKeg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	551.996.000,00	89.641.995,00	16,24
SubKeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	49.937.200,00	20.451.740,00	40,95
SubKeg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	321.704.900,00	127.075.000,00	39,50
SubKeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	9	Laporan	75,00	140.675.000,00	118.342.040,00	84,12

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator capaian Program Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) target 90% realisasi 81,42% sehingga capaian kinerja 90,47%. Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp5.170.140.466,00 atau 38,97% dari anggaran Rp13.266.969.800,00.

   Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 10 Dokumen sehingga capaian kinerja 76,92%. Sedangkan untuk Realisasi

Anggaran sebesar Rp33.385.000,00 atau 82,92% dari target sebesar Rp40.260.100,00,-. Kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 5 dokumen capaian kinerja 83,33% yaitu

- Renja Perubahan Tahun 2024,
- Renstra 2024 – 2026,
- Renja Tahun 2026,
- DPA TA 2024,
- RKA P Tahun Anggaran 2024,

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp18.215.000,00 atau 89,37% dari target anggaran sebesar Rp20.381.300,00

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 6 dokumen capaian 85,71% terdiri dari :

- Laporan Evaluasi tribulan 3 dokumen
- Laporan Evaluasi Internal 3 Dokumen

dan realisasi anggaran Rp 15.170.000,00 atau 76,31% dari target anggaran sebesar Rp19.878.800,00

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 71 dokumen yaitu Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan bulanan Pengeluaran dan penerimaan, Laporan semesteran, dengan realisasi 101 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 142,25%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp3.689.557.726,00,- atau 34,56% dari target anggaran sebesar Rp 10.676.582.850,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 37 orang dengan capaian 82,22%, realisasi anggaran sebesar Rp3.662.334.226,00 atau 34,48% dari target anggaran sebesar Rp10.622.025.850,00,- adanya mutasi ASN.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang

disusun sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.593.000,00,- atau 99,74% dari target anggaran sebesar Rp4.605.000,00,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 25 Laporan realisasi 18 Laporan dengan capaian 72,00% yang terdiri :

- Laporan Fungsional, administratif penerimaan dan pengeluaran
- Laporan semesteran
- Laporan fisik dan anggaran

realisasi anggaran Rp22.630.500,00 dari target anggaran sebesar Rp49.952.000,00,- sehingga mencapai 45,30%.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp13.240.500,00,- atau 54,40% dari target anggaran sebesar Rp24.338.000,00,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realiasi 9 Dok sehingga capaian 75%, realisasi anggaran sebesar Rp160.168.000,00,- atau 90,81% dari target anggaran sebesar Rp176.384.500,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan target kinerja 44 orang, realisasi 36 orang sehingga capaian kinerja 81,82% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp26.586.000,00,- atau 75,53% dari target anggaran sebesar Rp 35.200.000,00,-

1.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja 12 Dokumen, realisasi 8 Dokumen sehingga capaian kinerja 66,67% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.687.00,00,- atau 74,31% dari target anggaran Rp4.961.500,00,-

1.4.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Indikator Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 63 Orang, realisasi 54 Orang sehingga capaian kinerja 85,71% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp129.895.000,00,- atau 95,35% dari target anggaran Rp136.223.000,00,-

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 9 laporan sehingga capaian 75%, realisasi anggaran sebesar Rp344.579.498,00,- atau 57,77% dari target anggaran sebesar Rp596.500.500,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, Indikator Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja 90 paket, realisasi 65 paket, sehingga capaian kinerja 72,22% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp116.977.638,00,- atau 77,99% dari target anggaran sebesar Rp150.000.000,00,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket, realisasi 52 paket, sehingga capaian kinerja 86,67% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp46.376.165,00,- atau 61,84% dari target anggaran sebesar Rp74.999.500,00,-

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja 118.096 paket, realisasi 88.572 paket sehingga capaian kinerja 75% dan untuk realisasi anggaran

sebesar Rp27.221.655,00,- atau 57,92% dari target anggaran sebesar Rp46.998.900,00,-

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1.120 Lembar, realisasi 830 Lembar, sehingga capaian kinerja 74,11% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.650.000,00 atau 63,10% dari target anggaran sebesar Rp4.200.000,00,-

1.5.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.058.680,00,- atau 60,77% dari target anggaran sebesar Rp9.970.000,00,-

1.5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran Rp97.030.060,00,- atau 41,23% dari target anggaran sebesar Rp235.354.000,00,-

1.5.7 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 9 dokumen sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.265.300,00,- atau 64,37% dari target anggaran sebesar Rp74.978.100,00,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 2 unit terealisasi 1 unit sehingga capaian kinerja 50,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp261.032.000,00,- atau 40,85% dari target anggaran sebesar Rp639.024.250,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Sub kegiatan Pengadaan Mebel, Indikator Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan dengan target 50 Unit realisasi

187 Unit sehingga capaian kinerja 374,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp107.335.000,00 atau 98,30% dari target anggaran sebesar Rp109.187.250,00 dan rincian pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Meja	19 Unit
2	Kursi Staff	15 Unit
3	Kursi Raung Rapat	153 Unit
	JUMLAH	187 Unit

1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin kantor dengan target 15 realisasi 16 Unit sehingga capaian kinerja 106,67% dengan anggaran sebesar Rp529.837.000,00,- terealisasi Rp153.697.000,00,- atau 29,01% dan rincian pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Standing Dispenser	2 Unit
2	Kamera Mirrorless	1 Unit
3	Komputer PC	5 Unit
4	Printer Laser	4 Unit
5	Printer Tinta	3 Unit
6	Printer PBB	1 Unit
	JUMLAH	16 Unit

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp493.182.762,00 atau 66,98% dari target anggaran sebesar Rp736340700,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja

75%, digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.338.000,00,- atau 46,76% dari target anggaran sebesar Rp 5.000.000,00,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75%, hal ini digunakan untuk pembayaran listrik, Air, Telepon dan Air, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp140.835.349,00,- atau 68,33% dari target anggaran sebesar Rp206.100.000,00,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75%, hal ini digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 350.009.413,00,- atau 66,64% dari target anggaran sebesar Rp525.240.700,00,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 52 Unit realisasi 37 Unit sehingga capaian kinerja 71,15% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp174.994.980,00 atau 46,35% dari target anggaran sebesar Rp377.538.900,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target kinerja 19 Unit realisasi 15 Unit sehingga capaian kinerja 78,95. Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp88.927.580,00 atau 45,59% dari target anggaran sebesar Rp195.078.900,00

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengan target kinerja 10 unit terealisasi 5 unit sehingga capaian kinerja 50% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp1.500.000,00 atau 42,86% dari target anggaran sebesar Rp3.500.000,00

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 22 Unit terealisasi 16 Unit sehingga capaian kinerja 72,73% diantara untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp35.595.900,00 atau 28,48% dari target anggaran sebesar Rp125.000.000,00

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi terealisasi 100% dari target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.971.500,00 atau 90,76% dari target anggaran sebesar Rp53.960.000,00

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu terealisasi 612.323 WP dari target 667.000 WP atau 91,80%, Indikator Jumlah Wajib Pajak Baru terealisasi 1.746 WP dari Target 2000 WP, Indikator Prosentase Realisasi Pajak Daerah terealisasi 74,1% dari target 100% dan Indikator Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola terealisiasi 6,86% dari target 100%. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah Objek Pajak Baru terealisasi 3 dokumen atau 100% dari target kinerja 3 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.553.500,00 atau 2,62% dari target anggaran sebesar Rp250.000.000,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah target kinerja 1 Dokumen terealisasi

1 Dokumen atau 100% sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp20.652.550,00 atau 14,75% dari target anggaran sebesar Rp140.000.000,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah penyuluhan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan atau 75% . Penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa langsung, media sosial dan banner, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp153.997.900,00 atau 57,04% dari target anggaran sebesar Rp270.000.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 25 jenis dari target kinerja 25 jenis sarana sehingga capaian kinerja 100% seperti Buku bantu blok, Logo DHKP, sampul DHKP,SPPT, Spop dan L SPOP, SPTPD Reklame, restoran, Parkir, Minerba, Hiburan, kupon Undian dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp383.031.602,00 atau 87,32% dari target anggaran sebesar Rp438.676.800,00

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 12 laporan atau 75% dari target kinerja 9 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp82.173.400,00 atau 34,05% dari target anggaran sebesar Rp241.323.000,00

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp11.333.000,00 atau 3,41% dari target anggaran sebesar Rp332.000.000,00

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB terealisasi 7.192 OP atau 239,73% dari target kinerja 3.000 OP dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp28.268.737,00 atau 45,39% dari

target anggaran sebesar Rp62.281.000,00 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terealisasi 24 dokumen atau 75% dari target 18 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp105.366.600,00 atau 57,19% dari target anggaran sebesar Rp184.225.000,00, dikarenakan kegiatan untuk penyerahan SPPT secara simbolis tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan banyaknya desa yang minta segera didistribusikannya SPPT PBB-P2 ke Desa.

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi terealisasi 14.844 Layanan atau 42,41% dari target kinerja 35.000 Layanan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.873.300,00 atau 42,50% dari target anggaran sebesar Rp115.000.000,00

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 75% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp726.346.300,00 atau 55,20% dari target anggaran sebesar Rp1.315.727.000,00.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terealisasi 12 dokumen atau 75% dari target 9 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp89.641.995,00 atau 16,24% dari target anggaran sebesar Rp551.996.000,00

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai terealisasi 9 dokumen atau 75% dari target kinerja 10 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp20.451.740,00 atau 40,95% dari target anggaran sebesar Rp49.937.200,00, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan

yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 9 dokumen atau 75% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp127.075.000,00 atau 39,50% dari target anggaran sebesar Rp321.704.900,00

2.14 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 9 laporan atau 75% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp118.342.040,00 atau 84,12% dari target anggaran sebesar Rp140.675.000,00

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD (sesuai perda SOTK) terdiri dari :

2.3.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pearangkat daerah kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis usrusan pemerintahan dibidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk difokuskan pada pelayanan pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadai dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan sebagaimana table berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	Pemutakhiran Data Potensi PAD belum optimal
			Belum ada database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan
		Kinerja pemungutan PAD kurang optimal data dukung	Kurang Optimalnya tim pemungutan PAD
			Kurangnya Kepatuhan membayar Pajak
			Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk membantu pemungutan PAD
			Tidak adanya insentif bagi OPD penghasil retribusi
		Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	Digitalisasi layanan pajak belum optimal Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak Lambatnya waktu penyelesaian layanan
		Kurang Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan PAD	Penegakan sanksi wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar regulasi pajak kurang optimal Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

2.3.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang mencakup Standar Pelayanan Minimal dam tujuan pembangungan berkelanjutan (SDG'S)

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***"Nganjuk yang maju, adil dan sejahtera"*** Dalam

rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai;
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 4 (empat) Kabupaten Nganjuk yaitu "4. "Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;".

2.3.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat tantangan dan peluang.

- Tantangan yang dihadapi antara lain:
  1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
  2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan Pajak dan retribusi daerah
  3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
  4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.
- PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peluang yang dihadapi dalam pada tahun 2025, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Madiun.
5. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.
6. Adanya Obsen PKB dan BBNKB yang menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak daerah

2.3.3.5 Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 -2026 isu- isu penting dan strategis untuk mengatasi permasalahan pada tahun 2026 antara lain :

1. Aparatur pelayanan pajak dan retribusi yang berintegritas, profesional dan memadai jumlah dan kompetensinya.
2. Digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi
3. Dukungan operasional kelurahan dan kecamatan dalam membantu pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi
4. Insentif OPD penghasil retribusi

5. Sinergitas Pemkab dan Pemprov dalam pengelolaan pajak daerah

2.3.3.7 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bapenda				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bapenda				
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90%	17.750.654.821	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90%	17.750.654.821	
			Nilai sakip	A				Nilai sakip	A		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	40.000.000	

01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi perangkat daerah	7 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat daerah		Jumlah Evaluasi perangkat daerah	7 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**19 Laporan**	**15.140.854.821**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**19 Laporan**	**15.140.854.821**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	15.082.354.821	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	15.082.354.821	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.500.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	50.000.000	

	Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			SKPD					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25.000.000**	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**12 Dokumen**	**331.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**12 Dokumen**	**331.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44 Orang	51.000.000				44 Orang	51.000.000	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000	

09	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	275.000.000	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	275.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**560.400.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**560.400.000**	
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	150.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	75.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	50.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1120 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1120 dokumen	5.400.000	

08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**300.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**300.000.000**	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 Jasa**	**961.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 Jasa**	**961.000.000**	

01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	275.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	275.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	680.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	680.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**392.400.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**392.400.000**	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	200.000.000	

05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2.500.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	150.000.000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39.900.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39.900.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	
			Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP				Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP		
			Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00%				Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00%		
			Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00%				Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00%		

	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150.000.000	untuk pendataan potensi, penyusunan peta blok
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350.000.000	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	500.000.000	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	450.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	450.000.000	

06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	250.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	250.000.000	
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	75.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	75.000.000	
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220.000.000	
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	100.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	100.000.000	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1.800.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1.800.000.000	

11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.200.000.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.200.000.000	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70.000.000	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	375.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	375.000.000	
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200.000.000	
					23.590.654.821,00					**23.590.654.821,00**	

2.3.3.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk Badan Pendapatan daerah kabupaten Nganjuk tidak ada usulan sehingga tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Nganjuk
Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 masuk dalam prioritas Nasional Nomor 7 yaitu: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Prioritas Nasional ini dilaksanakan melalui:

- reformasi politik;
- reformasi hukum;
- reformasi tata kelola pemerintahan;
- dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

dan Arah Kebijakan difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi :

(1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum;

(2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung;

(3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital;

(4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara;

(5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara;

(6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta;

(7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah;

(8) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional;

(9) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui :

(a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor,

(b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah,

(c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta

(d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan

kinerja daerah); dan penguatan manajemen kinerja pembangunan

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui

(1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;
(2) Digitalisasi pelayanan publik;
(3) Pengembangan talenta digital pelayanan publik;
(4) Penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
(5) Perluasan akses pelayanan publik.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui :

(1) optimalisasi pendapatan negara,
(2) optimalisasi belanja negara, dan
(3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup :

(a) ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara
(b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data;
(c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian;
(d) optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi;
(e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi;

(f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- **Tujuan**

  Tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 *"Nganjuk Akuntabel".*

  Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik" sedangkan yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan Indikator Prosentase PAD terhadap Pendapatan.

- **Sasaran**

  Sasaran yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah *Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima dengan Indikator Opini BPK terhadap LKPD dan* **sasaran** Badan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase Kenaikan PAD

Pada tahun 2026 dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Penghitungan**	**Target Tahun 2026**
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	*Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan*	**Realisasi PAD** / **Realisasi Pendapatan** x 100	20,50%
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Penghitungan**	**Target Tahun 2026**
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	*Prosentase Kenaikan PAD*	**Realisasi PAD Th berjalan – Realisasi PAD Th lalu** / **Realisasi PAD Tahun Lalu** x 100	8,5%

Sedangkan Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2026 yang mempertimbangkan:

1. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
3. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD
4. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak

daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

5. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
   1). Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten berkenaan 3 tahun sebelumnya;
   2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten Nganjuk dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
   3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.

Target Pendapatan Tahun 2026 sebagaimana terlampir

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Pada Tahun Anggaran 2026 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp23.590.6547.821.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

   - menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
   - Menyusun administrasi Keuangan daerah
   - Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
   - Menyusun Administrasi Kepegawaian
   - Menyusun Administrasi Umum
   - Pengadaan Barang Milik Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang
   - Pemeliharaan Barang Milik daerah

   Dengan sasaran Program :

   1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Pajak
   2. Meningkatnya tata kelola Bapenda

   Indikator Program :

   1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pajak,
   2 Nilai Sakip Bapenda

   Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

Tujuan : untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

Hasil : Prosentase dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, dan penyusunan perencanaan lainnya.

Sasaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

Hasil : Persentase dokumen perencanaan yang disusun,

sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja

perangkat.

Sasaran : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hasil : Prosentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun.

sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan gaji dan pelaporan keuangan baik tahunan maupun bulanan, tribulan serta semester.

Tujuan : Menyusun Administrasi Keuangan Daerah.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan Administrasi Keuangan

Indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Hasil : Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang tersusun.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan kegiatan diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN termasuk PPPK, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan Retribusi daerah.

Sasaran : terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN.

Hasil : gaji dan tunjangan ASN yang terbayar.

sehingga terbayarkan gaji dan tujangan ASN tepat waktu

.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun.

Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, sehingga laporan akhir tahun tepat waktu.

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran

Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Hasil : persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun

sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tepat waktu

3. **Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah.

Sasaran : Administrasi Barang Milik daerah yang dilaksanakan.

Indicator : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Hasil : Tersusunya Administrasi Barang Milik daerah

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini laksanakan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan

Penatausahaan BMD SKPD.

Indicator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Hasil : Dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun

sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, dan pengadministrasian Kepegawaian.

Sasaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraj.

Indicator : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Hasil : % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sasaran : Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Hasil : Prosentase Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan

4.2 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran : Meningkatnya pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda.

Indicator : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

Hasil : administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

Subkegiatan ini digunakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN Bapenda dalam pengelolaan Pajak daerah, meningkatkan Integritas, Kinerja, disiplin ASN Bapenda Kab. Nganjuk.

Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator : jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Hasil : meningkatkan indeks Penilaian ASN

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum perangkat daerah.

Indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah

Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik, peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Sasaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Hasil : Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN, bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN.

Sasaran : tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Hasil : Prosentase paket logistic yang tersedia.

dengan tersedianya bahan logistic kantor diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas.

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas – berkas surat.

Sasaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Hasil : Prosentase Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan.

Sasaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Hasil : Prosentase Bahan Bacaan yang tersedia

sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas,

Sasaran : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Hasil : Prosentase Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang dilaksanakan.

sehingga dengan tersedianya kepeluan tamu dinas tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Hasil : Prosentase Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan ini untuk koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah sehingga dapat tercapainya PAD.

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Sasaran : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda,

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Hasil : Prosentase Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah.

Sasaran : Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan.

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan

Hasil : Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan

sehingga dengan tercukupinya barang akan memperlancar

pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Subkegiatan ini digunakan untuk keperluan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan oleh Bapenda kab. Nganjuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indicator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.

Hasil : Prosentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.

sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah yang Optimal dalam jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

Sasaran : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Prosentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Subkegiatan ini digunakan untuk pengiriman surat menyurat dan juga untuk belanja materai

Sasaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Hasil : Prosentase Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Dengan adanya Subkegiatan ini dapatnya tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

7.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan ini digunakan untuk pembayaran listrik, air, telepon

Sasaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan,

Hasil : Prosentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dengan adanya Subkegiatan ini memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Subkegiatan ini digunakan untuk jasa pelayanan umum diantaranya untuk biaya clening service, biaya tenaga administrasi, Informasi Tehnologi, Sopir.

Sasaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Hasil : Prosentase Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal.

Sasaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah,

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara

Hasil : Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara,

Dengan adanya Subkegiatan ini dapat menambah umur barang.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan.

Subkegiatan ini digunakan untuk memelihara kendaraan operasional dan lapangan Bapenda Kabupaten Nganjuk diantaranya untuk pemebelian BBM, Oil, Her kendaraan , Pajak Kendaraan bermotor, pengaantian suku cadang kendaraan.

Sasaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Hasil : Prosentase jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara

Dengan adanya Subkegiatan ini maka kendaraan operasional atau lapangan tetap dalam kondisi baik serta dapat digunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan Gedung diantaranya pengecatan, perbaikan apabila atap yang bocor, saluran air rusak, plafon rusak, penataan taman, rehab ruangan, pintu, kamar mandi dan lainnya yang memerlukan untuk memperbaiki Gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik dan yaman untuk bekerja.

Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Hasil : Prosentase jumlah Gedung yang dipelihara

Dengan dilaksanakan subkegiatan ini yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

Subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor diantaranya computer, printer, latop, Scanner, Genset dan juga perlengkapan kantor diantaranya AC. Pemeliharaan baik berupa service maupun suku cadangnya

Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya.

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Hasil : Prosentase jumlah peralatan yang dipelihara

Dengan dilaksanakan Subkegiatan ini dapat memperlancar pelaksanaan tugas dikarenakan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik.

8.4 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Subkegiatan ini digunakan untuk memelihara mebel diantaranya meja, kursi, almari, filing cabinet

Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel.

Indicator : Jumlah Mebel yang Dipelihara

Hasil : Prosentase mebel yang terpelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan Pendapatan daerah mulai dari Pelayanan Pajak daerah, pencarian potensi pajak daerah, pendataan, penetapan pajak, pengawasan, pemeriksaan pajak, penetapan target pendapatan, Analisa, penilaian pajak daerah, penyediaan sarana prasarana pajak, pembinaan kepada OPD Penghasil, Penagihan Pajak daerah, Rekonsiliansi realisasi pendapatan, verifikasi dan pembukuan, pelaporan pendapatan daerah.

Sasarannya Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan

Indicator : 1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah

2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola.

2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah.

   Indikator : Jumlah Wajib pajak baru

3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi.

   Indikator : Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Hasil Program : Meningkatnya Pajak daerah

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah.

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan

   Indicator : 1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah
   2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola.

2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah.

   Indikator : Jumlah Wajib pajak baru

3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi.

   Indikator : Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Hasil Program : Meningkatnya Pajak daerah

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk pencarian potensi yang menghasilkan Peta Blok Desa dan Juga digunakan untuk Menyusun target Pendapatan

Daerah yang dihasilkan dari data potensi, data realisasi tahun sebelumnya dikurangi tingkat kesulitan.

Sasaran : Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

Hasil : Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia

2.1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk Analisa dan pengembangan pajak yang menghasilkan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah baik itu Perda, Perbup maupun Keputusan Bupati.

Sasaran : Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

Hasil : Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang tersusun

2.1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan penyuluhan baik secara langsung maupun melalui penyebaran pamlet, banner maupun media social.

Penyuluhan pajak ini juga untuk penyuluhan terkait opsen PKB dan BBNKB yang mulai pada tahun

2025 sudah merupakan Pajak daerah

Sasaran : Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Indicator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Hasil : Prosentase Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan

2.1.4 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk penyedian sarana prasaran cetak PBB diantaranya Blanko SPPT, DHKP, buku blok, catirdge printonik serta blanko SPTPD

Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,

Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia

Dengan dilaksanakan Subkegiatan ini pengelolaan pajak daerah lancar dan tepat waktu dalam pencetakan PBB-P2 yang akhirnya pembayaran PBB-P2 lebih cepat realisasinya.

2.1.5 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

Subkegiatan kegiatan ini digunakan untuk pendaftaran obyek/subyek baru, Intensifikasi,

Ekstensifikasi, , pemuthakiran data Pajak yang menghasilkan data pajak lebih terupdate. Subkegiatan ini juga digunakan untuk pendataan Kendaraan roda dua maupun roda empat yang bekerja sama dengan kader Desa.

Sasaran : Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Hasil : Prosentase Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yang tersedia.

Dengan dilaksanakan Subkegiatan ini Data pajak baik obyek maupun subek pajak terupdate tiap tahunnya.

2.1.6 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan Sim Pengelolaan Pendapatan (E-Taxs Nganjuk) baik dalam penambahan menu atau update software lainnya.

Sasaran : Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Hasil : Prosentase laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah yang dilaksanakan.

Dengan dilaksanakan Subkegiatan ini Sim Pengelolaan pendapatan dapat teupdate sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

2.1.7 Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Subkegiatan ini digunakan untuk proses penilaian hasil pendataan PBB-P2 serta proses penilaian BPHTB sehingga dapat menghasilkan jumlah NJOP yang dimuthakirkan/disesuaikan dengan lapangan tiap tahunnya.

Sasaran : Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya,

Indikator : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya

Hasil : Prosentase Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya

2.1.8 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Subkegiatan ini digunakan untuk menetapan pajak daerah dari hasil pendataan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan data ketetapan pajak daerah yang riiil.

Sasaran : Tersedianya dokumen Ketetapan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Hasil : Prosentase Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang tersedia

2.1.9 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Subkegiatan ini digunakan untuk pelayanan Pajak mulai dari proses pendaftaran sampai dengan terselesainya pelayanan sesuai deng SOP Pelayanan dan SPP yang berlaku.

Sasaran : Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

Hasil : Prosentase Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Yang selesai

2.1.10 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Subkegiatan ini digunakan untuk Menyusun pelaporan pendapatan mulai dari meneliti, memverikasi data dengan mencocokan data yang masuk ke Kasda dengan data yang ada pada Sim Pendapatan, dan juga untuk rekonsiliasi dengan OPD Penghasil, Bank RKUD sehingga menghasilkan pelaporan pendapatan Daerah sesuai dengan yang ada pada Sim Pengelolaan pendapatan, SIPD, Bank RKUD.

Sasaran : Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Hasil : Prosentase Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi yang dilaksanakan.

2.1.11 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dengan melakukan penagihan secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dan juga untuk Menurunkan Tunggakan Pajak dengan melakukan penagihan secara aktif, diharapkan dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak yang ada,

Sasaran : Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

Hasil : Prosentase Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daera

2.1.12 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan unruk proses keberatan, pengurangan pajak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan, menyelesaikan sengketa pajak secara cepat dan efisien sehingga tidak mengganggu aktivitas usaha wajib pajak.

Dan juga dengan adanya mekanisme penyelesaian keberatan yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sasaran. : Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Hasil : Prosentase Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang dilaksanakan

2.1.13 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini digunakan mencegah dan menindak praktik penghindaran pajak melalui pemeriksaan dan pengawasan, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak dapat dideteksi dan ditindaklanjuti.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan wajib pajak akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menjamin keadilan dan kesetaraan: Semua wajib pajak harus diperlakukan sama di hadapan hukum, sehingga pengawasan yang adil akan mencegah terjadinya diskriminasi.

Mencegah kebocoran pendapatan daerahd engan melakukan pemeriksaan secara berkala, potensi kebocoran pendapatan daerah akibat kesalahan perhitungan, manipulasi data, atau praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Hasil dari pengawasan yang baik dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan.

Sasaran : Terlaksanannya Pemeriksaan serta

Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Hasil : Prosentase Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan.

2.1.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Subkegiatan ini bertujuan untuk :

- meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, dengan cara setiap transaksi tercatat secara digital, sehingga mudah dilacak dan diaudit sehingga risiko terjadinya korupsi dan penyelewengan dana dapat diminimalisir serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan Efisiensi yaitu proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat,. pengurangan penggunaan uang tunai dapat mengurangi biaya pengelolaan uang. Serta integrasi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan.
- Meningkatkan Penerimaan Daerah
  Pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, data transaksi yang terintegrasi dapat digunakan untuk menganalisis potensi penerimaan daerah dan dengan penggunaan sistem pembayaran digital

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran	:	Terlaksananya Upaya Mengubah Transasksi Tunai menjadi Non Tunai,
Indikator	:	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah,
Hasil	:	Prosentase Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah.

3.3.1 Rumusan Tema dan Prioritas Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

1. Tema

Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik

2. Prioritas

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
b. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
d. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
f. Peningkatan kondisi social masyarakat yang harminis dan berbudaya

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah Sebagaimana table berikut :

''TABEL PRINT OUT SIPD : MENU RENJA

''TABEL PRINT OUT SIPD : MENU RENJA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2026)
	Opini BPK terhadap LKPD	17.288.798.882

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah (PAD)	8,5%	23.590.654.821

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	JUMLAH TOTAL DANA INDIKATIF
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	**02**				**KEUANGAN**			23,590,654,821
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**90%**	**17,750,654,821**
						Nilai sakip	**A**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**13 dokumen**	**40,000,000**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20,000,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	20,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42 Dokumen**	**15,140,854,821**

5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	15,082,354,821
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8,500,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	50,000,000
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**25,000,000.00**
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8 dokumen**	**331,000,000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60paket	51,000,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	5,000,000
5	02	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	275,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 dokumen**	**560,400,000**

5	02	01	2.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	150,000,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	75,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	50,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	5,400,000
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200,000,000
5	02		2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	70,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**8 unit**	**300,000,000**
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	300,000,000
5	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3Laporan**	**961,000,000**
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6,000,000
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	275,000,000

5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	680,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**52 unit**	**392,400,000**
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	200,000,000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2,500,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	150,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39,900,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5,840,000,000**
						Jumlah Wajib Pajak Baru	**2500 WP**	
						Prosentase Realisasi Pajak Daerah	**100.00%**	
						Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	**100.00%**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5,840,000,000**
						Jumlah Wajib Pajak Baru	**2500 WP**	

						Prosentase Realisasi Pajak Daerah	**100.00%**	
						Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	**100.00%**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150,000,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	100,000,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350,000,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	500,000,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	450,000,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	250,000,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	75,000,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220,000,000

5	02	04	1.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	100,000,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 laporan	1,800,000,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70,000,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	375,000,000
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200,000,000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 ada kendala terkait capaian kinerja sasaran yang pada tahun 2024 ditargetkan 18% tidak akan tercapai karena Opsen PKB dan BBNKB yang masuk Pajak daerah baru dilaksanakan tahun 2025, maka untuk target sasaran tersebut perlu dirubah dalam reviu Renstra 2024 – 2026 dan terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan

3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam pemyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.